

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PILKADA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 DI KELURAHAN MURUNG RAYA**

M Satriawan Ridha, H M Uhaib As'ad, Junaidy

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120237

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1106036001

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1102088702

E-mail :

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data praimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancari informan dan dokumentasikan hasil penelitian analisis yang induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi politik masyarakat ada dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat meningkat diantaranya dorongan dari luar dan dalam masyarakat itu sendiri. Seperti kesadaran masyarakatnya, sosialisais yang dilakukan oleh pelakasana pemilu,melakukan pendekatan dengan tokoh- tokoh dimasyarakat, peranan media sosial, dan politik uang.

**Kata kunci : Partisipasi politik masyarakat, pemilihan suara ulang, PILKADA**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the factors causing people's political participation.*

*The research method used in this research is descriptive qualitative research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing informants and documenting the results of qualitative research, and the results of qualitative research were more meaningful than generalizations. Based on the results of the study, it was found that there are several factors that cause community political participation to increase, driven by encouragement from outside and within the community itself. Such as public awareness, socialization carried out by election officials, approaching community leaders, the role of social media, and money politics.*

**Keywords: Community political participation, re-election, PILKADA**

## **PENDAHULUAN**

Kota Banjarmasin pada waktu yang lalu melaksanakan pemilihan Walikota pada 9 Desember 2020 untuk memilih Wali Kota Banjarmasin Periode 2021 -2024. Pada pemilihan kali ini diikuti oleh 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota. Pada pemilihan serentak kali ini ada sedikit perbedaan dari pemilihan sebelumnya dikarenakan pemilihan kali diselenggarakan

ditengah massa pandemi covid 19, yang pasti kali akan ada sedikit penyesuaian dari segi penyelenggaraan pemilihan agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan sudah ditetapkan. Ini juga sedikit banyaknya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat agar datang ke TPS dalam menyalurkan hak suaranya, masyarakat masih banyak yang

takut akan keluar rumah, dikeranakan situasi masih dalam keadaan pandemi.

Rabu 9 Desember 2020 akhirnya PILKADA serentak diselenggarakan dengan memakai protokol kesehatan yang ketat. Dari pemilihan tersebut pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor, ditetapkan sebagai pemenang, dengan memperoleh suara 90.980 suara dengan persentase 39,3 persen. Urutan kedua ada paslon Ananda- Mushaffa yang memperoleh 74.154 suara atau 31,8 persen. Kemudian diurutan ketiga ada paslon Haris makkie – Ilham noor yang memperoleh 38.238 suara atau 15,5 persen. Diurutan terakhir ada paslon Khairul saleh – muhammad Ali habsyi yang memperoleh 31.334 suara atau 13,4 persen.

Tetapi kemenangan tersebut digugut oleh pasangan Ananda dan Mustafa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kemenangan tersebut berindikasi kecurangan. Gugatan tersebut dikabulkan oleh MK. Melalui putusan sidang sengketa Pilkada nomer 21/PHP.KOT-XIX/2021. Majelis Hakim MK, memutuskan untuk meminta KPU Kota Banjarmasin membantalkan surat keputusan terkait penetapan perolehan suara terbanyak. Karena dianggap telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggara Pilakada Kota Banjarmasin di tiga kelurahan di kecamatan Banjarmasin selatan.

Partisipasi politik masyarakat pada saat PILKADA serentak kota Banjarmasin 9 Desember 2020 mengalami penurunan, pasalnya diberbagai tempat pemungutan suara (TPS), jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak lah 100 persen. Bahkan ada beberapa TPS yang hanya 50 persen yang menggunakan hak suaranya, hasilnya partisipasi masyarakat pada pemilihan kali ini hanya 56.13 persen. Faktor utama mengapa terjadinya penurunan dari partisipasi masyarakat dikarenakan situasi masih dalam keadaan Pandemi COVID 19 akibatnya masyarakat

masih banyak yang takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Padahal KPU Kota Banjarmasin sudah genjar dalam melakukan sosialisasi dan kampanye untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan mekanisme dalam pemungutan pun sudah diatur agar masyarakat tidak berdesak desakan saat di TPS.

Dari hasil pemilihan suara ulang pada 28 April 2021 partisipasi masyarakat dalam pemilihan mengalami peningkatan dari pemilihan serentak yang lalu sebanyak 62 persen, walaupun itu masih jauh yang ditargetkan KPU Kota Banjarmasin sebesar 75 persen.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang kali ini mengalami peningkatan padahal pemilihan masih diadakan dalam keadaan pandemi sama seperti di pemilihan pertama yang dikatakan menurunnya partisipasi masyarakat akibat dari Pandemi. Dan juga setiap paslon tidak diperbolehkan lagi untuk berkampanye di pemilihan ulang kali ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian mendalam mengenai faktor- faktor apa saja yang membuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan suara ulang mengalami peningkatan.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan suara ulang di kelurahan Murung Raya bisa meningkat
2. Faktor - faktor apakah yang membuat partisipasi masyarakat di kelurahan Murung Raya meningkat.
3. Kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab partisipasi masyarakat meningkat dibandingkan dengan pemilihan pertama, dan juga mengetahui apakah peningkatan ini terjadi atas kesadaran dari masyarakat nya

atau karena ada pengaruh dari dorongan orang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### • **Konsep Partisipasi Politik.**

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, Partisipasi politik merupakan yang tidak bisa terpisahkan dalam politik suatu negara. (Sahid, 2011: 175). Mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya suatu negara yang memakai sistem demokrasi jika pemerintah yang berkuasa harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya warga negara juga harus memperhatikan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak maka demokrasi dinegara tersebut bisa dikatakan masih rendah.

Berdasarkan gagasan tersebut bahwa partisipasi politik merupakan suatu bagian sangat penting dalam kehidupan politik pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik bukan hanya sekedar memberikan hak suara untuk memilih pemimpin, tetapi lebih dari itu ketika partisipasi politik masyarakat disuatu negara yang memakai sistem demokrasi itu aktif bisa dikatakan berarti negara tersebut layak disebut negara demokrasi.

### • **Definisi partisipasi politik**

Partisipasi politik merupakan konsep yang sudah populer dalam ilmu politik, namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sebagian besar ilmuwan politik sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politiki. Tujuan utama dari pada kegiatan-kegiatan

politik itu adalah untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (Sitepu 2012;92)

- Menurut Miriam Budiardjo(2008) secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, anantara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak langsung. Mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (containing ) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen , menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action nya dan sebagainya.

### • **Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.**

Dalalm berbagai kegiatan partisipasi politik masyarakat pasti banyak faktor dan dorongan yang mempengaruhi masyarakat untuk aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Menurut Frank Lindefield (Sahid. 2011:185) faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan financial, menurutnya rendahnya ekonomi seseorang mengakibatkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan juga mengakibatkan muncunya rasa apatis terhadap kegiatan politik. Namun hal ini tidak terjadi pada orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi.

Sedangkan Surbakti (Sahid 2011; 185 ) menyebutkan bahwa dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi/rendah nya partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik seseorang diantaranya kesaran

terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalkan hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum dan hak kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaannya pemerintah.

Dari penjelasan yang disampaikan beberapa tokoh di atas bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat diantaranya karena faktor ekonomi, kesadaran politik, penilaian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pengaruh kaum intelektual dan juga budaya politik yang berkembang dalam suatu negara.

- **PILKADA Kota Banjarmasin Tahun 2020**

Sesuai Perppu Pilkada nomer 2 tahun 2020 yang disahkan menjadi undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomer 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Dan memutuskan untuk melaksanakan pemilihan serentak pada 9 April 2020. Kota Banjarmasin akan melaksanakan pemilihan Walikota pada 9 Desember 2020 untuk memilih Wali Kota Banjarmasin Periode 2021 -2024.

Pada pemilihan kali ini diikuti oleh 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota. Yang terdiri dari :

1. Abdul Haris Makkie – Ilham Noor
2. Ibnu Sina – Arifin Noor
3. Khairul Saleh – Habib M. Ali
4. Ananda – Mushaffa

Pilkada Kota Banjarmasin 2020 kali ini sedikit perbedaan dari pilkada sebelumnya, karena pemilu yang diselenggarakan masih dalam keadaan

masa pandemi Covid 19, yang membuat setiap Tim pemenangan pasangan calon masing-masing harus sangat memutar otak sangat keras untuk memenangkan calon yang diusung, karena kampanye besar-besaran tidak diperbolehkan yang mengundang kerubunan massa yang berakibat akan muncul penyebaran virus covid 19. Maka dari itu mau tidak mau setiap calon yang maju lebih banyak memaksimalkan massa kampanye melalui media digital, seperti instagram, youtube dan sebagainya. Itu yang membuat banyak pro dan kontra terhadap Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi. Mulai dari banyaknya ketakutan masyarakat akan datang untuk menyalurkan haknya yang berakibat partisipasi masyarakat akan turun pada pemilihan 2020. Dari data yang didapatkan, KPU Kota Banjarmasin menetapkan ada 423.392 jumlah pemilih untuk 1.870 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Banjarmasin. Jumlahnya adalah 208.942 pemilih laki-laki dan 214.450 pemilih perempuan dengan total keseluruhannya sebanyak 423.392 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk bisa mengikuti Pemilu 2020.

Dari pemilihan tersebut pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor, ditetapkan sebagai pemenang, dengan memperoleh suara 90.980 suara dengan persentase 39,3 persen. Urutan kedua ada paslon Ananda- Mushaffa yang memperoleh 74.154 suara atau 31,8 persen. Kemudian di urutan ketiga ada paslon Haris makkie – Ilham noor yang memperoleh 38.238 suara atau 15,5 persen. Di urutan terakhir ada paslon Khairul saleh – muhammad Ali habsyi yang memperoleh 31.334 suara atau 13,4 persen.

## **METODE PENELITIAN**

### **• Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif, menurut Lexy J Meleong dalam bukunya berjudul metode penelitian kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2009) yaitu teknik analisa ada yang terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh, kemudian mendeskripsikan temuan-temuan hasil penelitian dan mereferensi pada sumber-sumber tertulis. Setelah data didapatkan melalui dua cara yaitu wawancara dan dokumen terdahulu akan diolah dan dianalisis secara deskriptif yang kemudian akan didapatkan hasilnya.

Pedoman penulisan, berpedoman pada panduan penyusunan proposal dan penulisan skripsi. Yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Muhammad Arsyad Al- Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin.

### **• Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial (Polit & Beck, 2009, 2014). Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan

proses atau peristiwa penjabaran yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa.

### **• Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu berupa wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Informan utama dalam penelitian kali ini ada 5 sumber informasi mulai dari penyelenggara pemilihan suara ulang yaitu KPU kota Banjarmasin, dari PPK kecamatan Banjarmasin selatan, KPPS di Murung Raya, dan warga sekitar pemilihan minimal 2 orang.

### **• Sumber dan jenis data**

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data seperti buku- buku, jurnal, media online internet, majalah ilmiah, surat kabar, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu berupa wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Informan utama dalam penelitian kali ini ada 5 orang yaitu dari KPU kota Banjarmasin bisa dari divisi sosialisasi pemilihan, partisipasi masyarakat dan SDM kota, selanjutnya dari Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Banjarmasin Selatan, dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 02 Kelurahan Murung Raya, dan dua orang masyarakat sekitar wilayah TP 02. Setelah data diperoleh melalui wawancara dan dokumen akan diolah dan dianalisis secara deskriptif yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab peningkatan Partisipasi politik masyarakat pada PSU walikota Banjarmasin.**

Pemilihan kepala daerah atau lebih dikenal dengan istilah pemilukada atau Pilkada, yang diselenggarakan secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi kesempatan politik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai saran menuju demokratisasi.

Kedewasaan politik masyarakat Murung Raya dapat terlihat dari partisipasi politik mereka. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator perkembangan pemahaman politik masyarakat dalam sistem demokrasi Menurut Samuel Huntington, ada dua dimensi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada suatu daerah sebagai berikut:

- a. partisipasi yang bersifat otonom, yaitu merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara suka rela oleh masyarakat.
- b. partisipasi politik yang dimobilisasi adalah bentuk partisipasi politik yang tidak suka rela, tetapi digerakan oleh partai politik, kandidat calon, tim sukses atau pejabat pemerintah. Dalam hal ini warga negara pada umumnya kurang mengetahui, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya sehingga perlu digerakan. Ini mengakibatkan bisa timbul intimidasi atau berbentuk politik uang.

Dalam kehidupan politik, semua ciri tersebut bisa bercampur antara satu sama lain, misalnya seorang diajak untuk ikut demonstrasi penolakan terhadap rancangan suatu undang-undang. Orang diajak tersebut mungkin saja mau ikut secara sukarela, namun bisa saja dia tidak paham untuk apa sebenarnya dia melakukan demonstrasi.

Dari hasil wawancara saya dengan Bpk Taufiq Qurahman sebagai anggota

Komisioner KPU beliau menyapaikan apa saja penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Murung raya yaitu :

Beliau menjelaskan “Pada pemilihan serentak 9 Desember 2020 kemaren partisipasi masyarakat mengalami penurunan hanya dianggka 56% dan alhamdulillah kata beliau saat PSU mengalami peningkatan 63% walaupun kata beliau penghitungan ini dihitung secara 3 kelurahan yang melaksanakan PSU”.  
Wawancara Rabu 14 juli 2021

### **Kesadaran masyarakat**

Kesadaran masyarakat yang mulai meningkat menjadi salah satu penyebab partisipasi bisa meningkat, dibandingkan dengan pemilihan serentak 9 Desember yang lalu. Tetapi ini masih lumayan jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin. Itu menjadi evaluasi dari KPU kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang TPS.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Politik

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dalam Usman Abdul Mu’is (2000:97-97) faktor yang mempengaruhi kesadaran politik adalah

1. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain,tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
2. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi dimasyarakat.
3. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
4. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai peranan dalam mempengaruhi dan

menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Faktor-faktor ini pula dapat di jadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi sadar akan politik .

Sesuai dengan wawancara Bpk Taufiq Qurahman beliau mengatakan “KPU kota Banjarmasin sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terus dilakukan agar masyarakat dapat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan sebagai manifestasi atas kesadaran politik yang ia miliki. Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu”. Wawancara Rabu 14 Juli 2021

Berbeda dengan PILKADA 9 Desember yang lalu, PSU kali ini yang hanya di laksanakan di 3 kelurahan di 1 Kecamatan saja yang membuat tugas KPU kota akan sedikit mudah dan lebih Fokus lagi masyarakat dalam memberikan pemahaman dalam pentingnya kesadaran bepolitik.

“kami melakukan kersama dengan setiap elemen masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan para ulama dalam memberikan kesadaran bepolitik untuk menentukan siapa pemimpin kita depannya. Saya percaya masyarakat sudah cerdas dalam menanggapi masalah ini partisipasi masyarakat sangat lah penting dalam memajukan Kota Banjarmasin”. Wawancara Rabu 14 Juli 2021

Pendidikan pemilih idealnya dilakukan secara berkelanjutan bukan hanya pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan agar bisa melahirkan pemilih cerdas dan demokratis. Dengan demikian, upaya pendidikan pemilih harus menjadi komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dilakukan secara simultan.

Dari hasil wawancara dengan Bpk Aditiya selaku anggota PPS Murung Raya mengeni

pedidikan pemilih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat begini tanggapan nya: “kami dari PPS setelah ada intruksi untuk mengundang masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang PSU yang lalu, alhamdulillah menuai respon positif dan antusias masyarakat lumayan tinggi lah walau pun sekarang ini ditengah massa pandemi saat ini.” Wawancara Selasa 27 Juli 2021

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu dengan Bpk Husni Thamrin mengenai masalah kesadaran masyarakat di Murung Raya, beliau menjelaskan:

“Kesadaran masyarakat disini lumayan bagus beberapa kali kegiatan seperti gorong royong dan pembekalan tentang pemilihan masyarakat disini selalu antusias berhadir menjadikan ini sebagai contoh yang baik khususnya buat para pemuda disini dalam memaknai kehidupan dalam bermasyarakat yang baik”. Wawancara Kamis 15 Juli 2021

Dari sosialisasi pendidikan kesadaran masyarakat dapat dilihat PSU yang dilaksanakan yang mana partisipasi masyarakat yang lumayan naik dibandingkan PILKADA serentak yang lalu dari wawancara dengan Ketua KPPS 02 di Murung Raya Bpk Ahmad Saili beliau menjelaskan:

“Masyarakat lumayan antusias dalam PSU kali ini terlihat masyarakat yang lumayan banyak yang datang ke TPS, itu seandainya tidak dimassa pandemi mungkin banyak warga yang berbondong bondong dan mensaksi kan pemilihan berlangsung. Dikarena tidak boleh mensaksikan takutnya menimbulkan kerumunan masyarakat akhirnya warga diberikan jadwal untuk memilih sesuai dengan urutan jam yang sudah ditentukan, tetapi itu tidak partisipasi masyarakatnya menurun” Wawancara Selasa 27 Juli 2021

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum telah dan akan terus berikhtiar menjalankan program pendidikan pemilih sebagai upaya peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih melalui proses indoktrinasi dan penanaman nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai luhur demokrasi harus selalu dihadirkan dalam setiap proses politik bangsa ini agar tercipta tatanan kehidupan demokrasi yang lebih sehat yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian tujuan demokrasi substantif yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

### **Kendala Partisipasi politik**

Sejak tahun 1960-an telah mulai dikenalkan kebijakan partisipatif, Dimana dalam setiap proses kebijakan publik diperlukan adanya partisipasi masyarakat, akan tetapi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tersebut bukan tanpa kendala, sering kali masyarakat mengalami hambatan dalam menyampaikan aspirasinya.

Partisipasi politik seharusnya merupakan tindakan yang diikuti oleh masyarakat secara sukarela di dalam kegiatan-kegiatan politik, akan tetapi justru mereka sering kali dilibatkan dalam sebuah rencana kegiatan atau dalam pembangunan dengan cara mobilisasi. Kendala dalam partisipasi politik dalam perumusan kebijakan bisa berasal dari para pembuat kebijakan atau ada juga yang berasal dari masyarakatnya sendiri

Kendala yang berasal dari masyarakat antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses perumusan kebijakan publik
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi politik dan cara-cara partisipasi politik dilakukan, serta media partisipasi
- c. Kurang kesadaran masyarakat akan hak politik mereka, sehingga mereka merasa

tidak mampu untuk memperjuangkan hak mereka sendiri

- d. Lembaga perwakilan politik dan partai politik yang lebih memperjuangkan partai dan golongannya, sehingga masyarakat merasa sia-sia ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan, seseorang berpartisipasi biasanya dengan harapan bahwa partisipasi yang sudah mereka lakukan akan memberikan dampak yang positif atau dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.

## **KESIMPULAN & SARAN**

### **• Kesimpulan**

Pemilihan suara ulang pada PILKADA kota Banjarmasin diharapkan menjadikan pembelajaran politik bagi masyarakat, apalagi pemilihan suara ulang ini baru pertama kali terjadi di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin, di harapkan partisipasi masyarakat di Banjarmasin selalu tinggi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam politik. Karena sukses dan tidaknya sebuah Pemilu dilihat dari besar dan kecilnya partisipasi masyarakatnya dari pemilihan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) PILKADA kota Banjarmasin, sesuai dengan apa hasil dari penelitian yaitu, Kesadaran Masyarakat, Sosialisasi secara Intensif, peran media sosial, kerjasama dengan stakeholder terkait (Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Kepolisian) dan politik uang. Kelima faktor ini saling menopang satu sama lain.

Kesadaran masyarakat pada PSU ini dikatakan baik mereka berperan aktif dalam menghadapi PSU ini bisa dilihat antusias masyarakat yang tidak acuh dalam sosialisasi yang dilakukan KPU kota Banjarmasin. Kedewasaan



masyarakat dalam politik membuat kesadaran masyarakat lumayan tinggi. mereka sadar bahwa suara mereka menentukan nasib daerah mereka dan kota Banjarmasin kedepannya.

Sosialisasi secara Intensif yang dilakukan KPU kota Banjarmasin sebagai penyelenggara dalam memberikan pemahaman politik kemasyarakatan agar tidak meniadakan hak mereka dalam PSU ini. KPU kota Banjarmasin melakukan persiapan menjelang PSU dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat dibalai Kelurahan murung raya untuk memberikan pemahaman berpolitik sekaligus silaturahmi kemasyarakatan dan mengajak masyarakat bekerja sama dalam mensukseskan PSU ini jauh dari kejurangan politik dan isu sara, diharapkan masyarakat dewasa dalam menentukan pilihan untuk kemajuan Banjarmasin kedepannya.

Peranan media sosial sangatlah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat apalagi situasi sekarang ini yang mau tidak mau membuat kita harus bisa beradaptasi dengan situasi pandemi sekarang ini. Media sosial mampu menjadi cara paling efektif bagi KPU dalam memberikan informasi kemasyarakatan menjelang PSU agar masyarakat mengetahui informasi, dan dapat berpartisipasi dalam PSU ini.

Kerjasama dengan semua Stakeholder yang terkait, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak kepolisian dan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama cara ini dianggap ampuh di mana masyarakat akan lebih mudah menerima penyampaian yang diberikan oleh tokoh atau sesepuh ditempat tersebut. Dan memerintahkan setiap tempat ibadah seperti mushola dan masjid disekitar kawasan tersebut melakukan

sosialisasi menggunakan toa/ pengeras suara dalam memberikan informasi kemasyarakatan.

Politik uang masih menjadi budaya ditengah masyarakat yang dilihat dari tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak merata menjadi politik uang sangat sulit untuk dihilangkan seperti menjadi budaya yang sangat dekat dengan masyarakat.

Menurut penelusur, bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat pada Pemilihan suara Ulang PILKADA kota Banjarmasin jika dilihat faktor-faktor yang ada dilapangan ini merupakan partisipasi masyarakat yang dimobilisasi. Seperti yang disebut oleh Samuel Huntington dan Nelson bahwa partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak suka rela, tetapi yang digerakan oleh partai politik, kandidat calon, tim sukses atau pejabat pemerintah

#### • **Saran**

Untuk pemerintah harus melakukan pendidikan politik kemasyarakatan sejak dini agar masyarakat semakin dewasa dalam menanggapi ketika memasuki masa pemilihan seperti agar masyarakat tidak terpecah belah oleh perbedaan pilihan dan menangkalkan pelanggaran politik yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

PSU ini sebuah pembelajaran politik yang sangat bagus buat masyarakat tergantung oleh pihak terkait sejauh mana bisa memberikan pengarahan kemasyarakatan agar bisa belajar pada PSU ini,

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rivai 2011 Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan suara ulang Tanggeang selatan.
- Tia subekti . 2014 Studi turn of voter dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Magetan.

- L.M Azhar Sa'ban , Anwar Sadat, Nastia.  
2019 Partisipasi politik masyarakat  
dalam pemilihan Kepala Daerah  
Kota Baubau. Kajian ilmu  
pemerintah dan Politik Daerah.  
Volume 4- nomor 1. Halaman 29-38.
- BLexy J Meleong . 2009. metode  
penelitian kualitatif ( Bandung :  
Remaja Rosdakarya ,
- Mokhammad Samsul Arif. 2020. Electoral  
governance . Tata kelola pemilu  
Indonesia. Volume 2 No. 1 halama  
23.
- Sayyidatul Insiyah. Supremasi Hukum.  
Pemilihan kepala Daerah oleh dewan  
perwakilan rakyat Daerah Jurnal  
penelitian Hukum .vol 28 No. 2.  
Halaman 163-186.